

**KEDUDUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum**



Oleh :

**NOVRIAN ANSHAR GAFUR
NIM. 23.01.211.00009**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

TESIS

OLEH:

**NOVRIAN ANSHAR GAFUR
NIM 23.01.211.00009**

**Disetujui untuk Ujian Tesis
Bangkalan, 28 Juli 2025**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Prof. Dr. Indien Winarwati, S.H., M.H
NIP. 19201082001122002**

**Dr. Nurus Zaman, S.H., M.H.
NIP. 197210212006041001**

HALAMAN PENGESAHAN

**KEDUDUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

TESIS

OLEH:

**NOVRAN ANSHAR GAFUR
NIM 23.01.211.00009**

**Tesis ini telah diuji dan berhasil dipertahankan
dihadapan Majelis Penguji Tesis Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura, Pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025**

MAJELIS PENGUJI

PENGUJI I (Ketua)

**Dr. Indra Yulianingsih, S.H., LL.M
NIP. 197407192003122001**

PENGUJI II

PENGUJI III

**Dr. Syamsul Fatoni, SH., MH.
NIP.197306052005011001**

**Dr. Mufarrijul Ikhwan, S.H., M.Hum.
NIP. 197605262003121001**

PENGUJI IV (Pembimbing)

PENGUJI V (Pembimbing)

**Prof. Dr. Indien Winarwati, S.H., M.H
NIP. 19201082001122002**

**Dr. Nuruz Zaman, S.H., M.H.
NIP. 197210212006041001**

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura**

**Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H.
NIP.196912312001122002**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novrian Anshar Gafur
NIM : 23.01.211.00009
Judul Tesis : Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Dengan ini saya menyatakan, bahwa tesis ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan/ magister di suatu perguruan tinggi lain, dan di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila suatu saat ada pihak lain yang melakukan klaim bahwa tesis ini merupakan plagiat karya ilmiah yang lain, dan dapat dibuktikan, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan, 28 Juli 2025

NOVRAN ANSHAR GAFUR
NIM 23.01.211.00009

.

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran vital dalam menjamin pelaksanaan demokrasi berdasarkan asas kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum KPU dalam struktur ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mengevaluasi sejauh mana prinsip independensi dijamin secara konstitusional. Isu ini menjadi penting mengingat masih terjadinya intervensi politik terhadap kewenangan KPU, seperti dalam kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 dan penetapan jadwal pemilu yang bergantung pada persetujuan DPR dan Pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis dan normatif, Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan UUD 1945 sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945. Meskipun KPU tidak secara eksplisit diklasifikasikan sebagai lembaga negara dalam struktur trias politika klasik KPU memenuhi kriteria sebagai lembaga independen yang memiliki *constitutional importance*. Independensi Komisi Pemilihan Umum mencakup tiga dimensi utama: Pertama, Independensi struktural, yaitu KPU tidak berada di bawah lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif manapun. Kedua, Independensi fungsional, yaitu KPU bebas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa intervensi pihak luar. Namun, dalam praktiknya, independensi KPU seringkali tereduksi oleh dinamika politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan perlindungan hukum terhadap independensi KPU guna menjaga integritas pemilu dan sistem demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, independensi, Demokrasi, lembaga negara.

ABSTRACT

The General Elections Commission (KPU) is an election organizing institution that plays a vital role in ensuring the implementation of democracy based on the principle of popular sovereignty. This study aims to analyze the KPU's legal standing within the state structure under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and to evaluate the extent to which the principle of independence is constitutionally guaranteed. This issue is crucial given the ongoing political intervention in the KPU's authority, such as in the case of Gibran Rakabuming Raka's candidacy for the 2024 election and the determination of the election schedule, which is dependent on the approval of the House of Representatives (DPR) and the government.

The research method used is normative, with a legislative and conceptual approach. The legal materials used include primary and secondary legal materials analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that, theoretically and normatively, the General Elections Commission's position under the 1945 Constitution is national, permanent, and independent, as stipulated in Article 22E Paragraph (5) of the 1945 Constitution. Although the KPU is not explicitly classified as a state institution within the classical trias politica structure, it meets the criteria for an independent institution with constitutional importance. The independence of the General Elections Commission encompasses three main dimensions: First, structural independence, meaning the KPU is not subordinate to any executive, legislative, or judicial institution. Second, functional independence, meaning the KPU is free to carry out its duties and functions without external interference. However, in practice, the KPU's independence is often undermined by political dynamics. Therefore, institutional strengthening and legal protection of the KPU's independence are necessary to maintain election integrity and the democratic system in Indonesia.

Keywords: General Elections Commission, independence, democracy, state institutions.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik.

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi membawa berbagai perubahan, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran penting dan strategis dalam menjamin pelaksanaan demokrasi yang berkualitas. Namun demikian, peran dan kewenangan KPU dalam praktiknya kerap dihadapkan pada tantangan independensi dan intervensi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui tesis ini penulis berupaya untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan konstitusional KPU serta sejauh mana prinsip independensinya dijamin dalam sistem hukum Indonesia.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Safi, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
2. Ibu Dr. Erma Rusdiana, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Bapak Dr. Nurur Zaman, SH., MH. Selaku Koordinator Program Magister Hukum sekaligus Dosen pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, masukan, didikan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini hingga dapat diselesaikan dengan baik
4. Ibu Prof. Dr. Indien Winarwati, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, masukan, didikan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini hingga dapat diselesaikan dengan baik
5. Ibu Dr. Indra Yulianingsih, S.H., LL.M Selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan Saran beserta masukan untuk penyempurnakan Tesis ini
6. Bapak Dr. Syamsul Fatoni, SH., MH. Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan Saran beserta masukan untuk penyempurnakanTesis ini
7. Bapak Dr. Mufarrijul Ikhwan, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji III yang telah memberikan Saran beserta masukan untuk penyempurnakanTesis ini
8. Kepada seluruh jajaran dosen pikema dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang turut membantu penulis dalam segala urusan administrasi saat penyusunan Tesis ini.
9. Kepada orang tua penulis, yang telah memberikan doa, nasehat, dan dukungan.
10. Kepada Isteri penulis Novi Alifia Wildatus Saidah, S.Pd. yang telah memberikan doa, nasehat, dan dukungan.

11. Kepada teman-teman penulis yang tidak disebutkan satu demi satu, baik di dalam maupun diluar Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan semangat, dukungan, serta nasihat serta penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Penyusun tidak dapat membalas kebaikan serta budi baik mereka satu persatu, namun iringan doa semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda *amīn yā rabbal 'alamīn*. Karena kalianlah alasan untuk segera dapat menyelesaikan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini, karena tak ada gading yang tak retak.

Wallahul mūwaffiq ilā aqwamiṭṭarīq.

Wa 'alaikumussalām wa raḥmatullāhi wa barakātuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan	8
1.3. Tujuan	9
1.4. Manfaat	9
1.5. Keaslian.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	11
BAB II PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN	
UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.....	18
2.1. Teori Lembaga Negara.....	18
2.2. Teori Demokrasi.....	21
2.3. Teori Independen	25
2.4. Komisi Pemilihan Umum.....	30

BAB III KEDUDUKAN KOMISI PEMLIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945	40
3.1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu.....	40
3.2. Independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu	59
BAB IV	71
PENUTUP.....	71
4.1. Kesimpulan.....	71
4.2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73